Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN KELAS 1A

Fatimatus Sa'diya[1], Ach. Faisol[2], Shofiatul Jannah[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012032@gmail.com , [2]ach.faisol@unisma.ac.id, [3]shofia@unisma.ac.id

Abstract

Advances in information technology have prompted the Supreme Court of the Republic of Indonesia to transform its judicial system through the implementation of e-Court. This system is regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 7 of 2022 and aims to increase efficiency, transparency, and ease of access to electronic judicial services. The Balikpapan Religious Court is one of the institutions that has implemented this system, particularly in divorce cases, which have seen a steady increase in cases year after year. This situation raises questions about the effectiveness of the e-Court system in accelerating and simplifying the legal process for justice seekers. This study aims to describe the implementation of e-Court in handling divorce cases at the Balikpapan Religious Court and to assess its effectiveness in supporting the principles of fast, simple, and low-cost justice. The study employed a qualitative approach and utilized field research methods. Data collection techniques included interviews with relevant parties such as judges and court clerks, collection of case documents, and a literature review. Based on research results, the implementation of e-Court at the Balikpapan Religious Court is considered quite effective because it can accelerate administrative processes and reduce the cost burden on litigants. Furthermore, this system also increases transparency and public access to judicial services. However, its effectiveness still faces several obstacles such as unstable internet network quality, low public understanding of digital technology, and technical errors in the document upload process that cause delays. Therefore, steps are needed, such as increased socialization, training on system usage, and strengthening the technological infrastructure to support the optimization of e-Court implementation going forward.

Keywords: *E-court, Effectiveness, Divorce Lawsuit, Religious Court*

A. Pendahuluan

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Jika dijelaskan dengan lebih spesifik, kewenangan yudikatif sebagai bagian dari pembagian kekuasaan Negara dipegang oleh lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses peradilan yang berlangsung diindonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencapai keadilan

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

secara lebih lanjut, sebagai lembaga yang menyelenggarakan proses peradilan memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. (Naibaho and Hasibuan 2021). Dalam sistem ketatanegaraan, pengadilan bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa melalui mekanisme pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal ini pengadilan agama bagian salah satu lembaga peradilan di bawah mahkamah agung, pengadilan ini menangani perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten/kota di seluruh indonesia. (Lestari 2021). Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang efisien, pengadilan perlu berinovasi. Salah satu inovasi penting adalah digitalisasi administrasi perkara melalui penerapan sistem *e-Court.* (Ahmad Asif Sardaril,2019). E-Court hadir sebagai solusi untuk mewujudkan sistemadministrasi perkara yang modern, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan ini menandai komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berinovasi serta melakukan reformasi di bidang peradilan guna menjawab tuntutan perkembangan teknologi informasi. (Pebrianto, Azwar, and Ikhwan 2021).

Tujuan penertiban Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk penerapan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau. Dengan adanya pembaruan dalam administrasi dan prosedur persidangan, diharapkan masalah hukum dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan kurangnya biaya. (Elektronik 2021) Implementasi *e-court* merupakan bagian dari reformasi peradilan Mahkamah Agung yang diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hingga yang terbaru PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tata cara administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang mencakup layanan *e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation*. Tujuannya adalah menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian perkara. (Retnaningsih et al. 2020)

Di Pengadilan Agama Balikpapan, penerapan *e-court* menjadi penting mengingat tingginya jumlah perkara cerai gugat. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 1.672 perkara cerai gugat telah diputus. Meskipun sistem ini membawa sejumlah kemudahan, kenyataannya masih terdapat kendala teknis, seperti

keterbatasan akses internet, kesalahan unggah dokumen, dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas penerapan *e-Court* di tingkat lokal. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti kesulitan dalam pengunggahan berkas elektronik akibat keterbatasan jaringan internet atau kapasitas file yang besar, minimnya pemahaman teknis dari para pengguna, serta gangguan teknis pada aplikasi *e-court* itu sendiri. Kendala-kendala ini berpotensi menghambat efektivitas sistem *e-court* yang bertujuan mempermudah proses peradilan. Dengan adanya *e-court* tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perkara secara online dan diharapkan lebih efektif. Akan tetapi, problem lain juga muncul, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, apakah dengan adanya pelayanan pengadilan secara online justru menjadi akses mudah masyarakat dalam pengurusan perkara sehingga dapat menjadi satu pemicu meningkatnya angka perkara khususnya di Pengadilan Agama Balikpapan. (Ahadi and Ahadi n.d.)

Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik di Pengadilan Agama Balikpapan Perma no 7 tahun 2022 , Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem *e-Court* mampu mencapai tujuan efisiensi dan aksesibilitas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Balikpapan dalam menangani hambatan tersebut. (Ikhwan 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan *e-Court* berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Balikpapan. Kajian ini juga mengisi penelitian sebelumnya yang lebih banyak bersifat normatif atau belum fokus pada efektivitas praktik lokal.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem *e-Court* yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan peradilan. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu rumusan masalah yang pertama bagaimana penerapan E-Court dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Balikpapan, sedangkan rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana efektivitas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Balikpapan Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya, baik kelebihan maupun kekurangannya, untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Salah satu penelitian terdahulu yang berjudul “Prespektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Media Eloktronik” yang dilakukan oleh Sanusih

Elmi, Amelia Rahmaniah, Rafly Muhammad, pada tahun 2020 Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* yang menggunakan pendekatan konseptual deskriptif analisis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanusih Elmi, Amelia Rahmaniah, Rafly Muhammad yaitu Kajian penelitian sama-sama membahas tentang penekanan pada efektivitas administrasi perkara dan persidangan elektronik, perbedaan yaitu Lebih fokus perspektif advokat di Banjarmasin terhadap efektivitas *E-Court* secara umum, sedangkan penelitian ini terfokus pada efektivitas penerapan *E-court* yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2022. (sanusih elmi et al. 2024).

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertumpu pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sosial, khususnya terkait penerapan sistem e-Court dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Balikpapan. (Jailani et al. 2020) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan konseptual. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai pelaksanaan e-Court serta hambatan yang muncul dalam prosesnya, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis temuan lapangan berdasarkan teori dan regulasi yang relevan Sumber data dibagi menjadi dua kategori: data primer yang di peroleh secara langsug dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan diskusi, Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Hubermen. Miles dan Hubermen (1994) dalam (Feni, 2021) untuk analisis data. mengklaim bahwa tiga tugas penting diselesaikan selama proses pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan/vertifikasi. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan alat untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh yang mana terdiri dari tiga teknik keabsahan data yaitu Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan kebijakan strategis yang mendukung modernisasi sistem peradilan. Peraturan ini menyempurnakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan praktik peradilan.Perma ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan elektronik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman. Cakupan e-Court diperluas hingga mencakup seluruh tahapan proses persidangan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pembacaan putusan.Selain memperluas jenis perkara yang dapat ditangani secara elektronik, termasuk perdata umum, perdata agama, TUN, dan militer, Perma ini juga membuka akses penggunaan e-Court bagi berbagai pihak, seperti kurator, pengurus, dan pihak lain yang memenuhi syarat.Secara keseluruhan, Perma No. 7 Tahun 2022 memiliki peran penting dalam mendorong digitalisasi peradilan, meningkatkan akses terhadap keadilan, serta menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan mengenai *e-court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, yang diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Meskipun PERMA 2022 merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya, tidak seluruh ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengalami perubahan secara menyeluruh. Hanya beberapa pasal atau substansi tertentu yang direvisi, diperjelas, atau diperbaharui agar lebih sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan elektronik yang berkembang. Secara umum, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 masih merujuk pada kerangka dasar yang sama, yakni pengaturan tentang proses administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan melalui sarana elektronik di lingkungan peradilan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan akomodatif terhadap dinamika penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Peraturan ini secara resmi ditetapkan dan diberlakukan mulai tanggal 10 Oktober 2022, dan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan *e-court* di seluruh pengadilan di Indonesia guna mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih efisien, transparan, dan terjangkau oleh masyarakat Pada dasarnya, implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama telah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.

Sejalan dengan itu, penggunaan *E-Court* dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan dapat dianggap sebagai perwujudan prinsip peradilan yang efisien. Jika dibandingkan dengan prosedur konvensional secara luring, mekanisme daring melalui *e-court* jelas lebih menghemat waktu dalam pengurusan perkara. (Shodikin, Saepullah, and Lestari 2021) Meski hanya penggunaan 40%, *e-court* tetap menjadi pilihan utama bagi pengacara dalam hal pengajuan kasus karena efektivitas biaya dan kemampuannya memodernisasi sistem administrasi untuk penyelesaian kasus perdata. Keberhasilan transformasi digital dan pengembangan

sistem *e-Court* sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Pelatihan staf dalam administrasi, penggunaan, dan penerapan teknologi digital harus menjadi tujuan utama pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian e-court yang sebenarnya. Terdiri dari hakim, pejabat pengadilan, teknisi teknologi informasi dan teknologi digital, dan pegawai pengadilan di semua tingkatan, serta memberikan informasi yang dibutuhkan kepada mereka yang perkaranya dibawa ke pengadilan. Dari Mahkamah Agung hingga pengadilan provinsi, kerangka kerja untuk pengoperasian sistem teknologi digital harus ditetapkan. Perlu dilakukan pelatihan ulang kepada hakim dan pegawai pengadilan untuk memahami e-court dan menyesuaikan diri dengan lingkungan daring. (Artauly et al. 2023)

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. **Penerapan *e-court* perkara cerai gugat di pengadilan agama Balikpapan kelas 1A**

   Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan regulasi yang memiliki sifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan peradilan. Hadirnya peraturan yang mengatur tentang sistem e-Court merupakan respons terhadap tuntutan zaman, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat. Apabila sistem peradilan tidak turut beradaptasi dengan kemajuan ini, maka dikhawatirkan lembaga peradilan akan tertinggal dari dinamika masyarakat yang semakin digital. Oleh karena itu peluncuran sistem e-court oleh Mahkamah Agung sebagai instrumen digital yang wajib diterapkan di seluruh pengadilan di bawahnya merupakan langkah progresif dalam reformasi peradilan. Meski demikian, implementasinya tentu tidak luput dari sejumlah tantangan, terutama dalam hal efektivitas penerapan dan pencapaian nilai keadilan substantif dalam proses persidangan elektronik.

   Namun secara umum, kehadiran e-court dapat dipandang sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat akan sistem peradilan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Balikpapan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian perkara secara elektronik, khususnya dalam perkara cerai gugat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Agama Balikpapan yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025.

   Perkara perkawinan di Pengadilan Agama Balikpapan dicatat menggunakan sistem digital *e-Court* yang diciptakan untuk mengefisienkan

administrasi perkara di pengadilan. Antar muka pengguna (UI) yang mudah digunakan dan ramah sangat penting bagi keberhasilan sistem karena dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kendala teknis, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. (Ayun, Am, and Billah 2025) Sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara perkawinan secara lebih efisien. Penerapan sistem *e-court* memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan bagi para penggunanya. Berkat aplikasi *e-court,* para pihak yang berperkara dapat menghemat biaya transportasi dan waktu karena tidak perlu bepergian ke pengadilan atau mengantre untuk menggelar sidang. Hal ini memungkinkan mereka untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk kegiatan lain, yang berarti menghemat biaya tenaga dan waktu. (Azzahiroh, and Mahameru 2020)

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Balikpapan sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pemanfaatan sistem *e-Court* menjadi instrumen yang mendukung upaya tersebut karena mampu menyederhanakan proses administrasi perkara secara efisien dan modern, berbeda dengan prosedur manual yang memerlukan waktu dan tenaga lebih. (humaidi s 2025) Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sistem e-Court telah dioperasikan oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), panitera, serta hakim dalam menangani perkara cerai gugat. Seluruh rangkaian proses, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pengunggahan dokumen, hingga pemanggilan para pihak dilakukan secara digital melalui platform *e-Court.* Hal ini mencerminkan bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah menerapkan e-Court sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Jenis layanan administrasi yang tersedia melalui *e-court* mencakup:

a. E-filling: pendaftaran perkara secara daring
b. E-payment: pembayaran panjar biaya perkara secara daring
c. E-summons: pemanggilan para pihak secara daring
d. E-litigation: pelaksanaan sidang secara daring

Walaupun tingkat penggunaan *e-Court* oleh masyarakat masih berada pada angka sekitar 40%, sistem ini tetap menjadi alternatif utama. terutama bagi kalangan advokat, karena dinilai lebih hemat waktu dan biaya. Keberhasilan dalam digitalisasi ini sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, sehingga pelatihan bagi hakim, staf pengadilan, dan tenaga teknis IT sangat penting dalam meningkatkan kinerja sistem. Keberadaan e-Court memberikan

kemudahan baik bagi internal pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan. (Hidayati and Lubis 2024)

Para pihak tidak lagi diwajibkan hadir secara fisik ke pengadilan yang secara langsung berdampak pada penghematan biaya dan waktu. Hal ini tentu menjadi nilai tambah jika dibandingkan dengan prosedur konvensional yang masih mengandalkan kehadiran fisik dan proses manual yang cenderung memakan waktu. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama balikpapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *e-Court* pada tahap pendaftaran perkara di Pengadilan Agama dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Meskipun tingkat penggunaannya baru mencapai sekitar 40 persen dari total pendaftar, sistem ini telah diterapkan dengan cukup baik dan tidak menemui hambatan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi teknis dan operasional, *E-Court* telah mampu mendukung proses administrasi perkara secara elektronik dengan lancar, meskipun masih diperlukan dorongan agar tingkat partisipasi pengguna semakin meningkat. (Indonesia 2019). Sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara perkawinan secara lebih efisien. Penerapan sistem *e-court* memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan bagi para penggunanya. Berkat aplikasi e-court, para pihak yang berperkara dapat menghemat biaya transportasi dan waktu karena tidak perlu bepergian ke pengadilan atau mengantre untuk menggelar sidang.

Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama memberikan berbagai kemudahan, seperti mempermudah pendaftaran perkara, menghemat waktu melalui proses online yang lebih efisien, mempermudah pembayaran panjar biaya secara praktis tanpa harus antre di kasir, serta membantu hakim dalam mengakses dan mengelola dokumen secara digital tanpa bergantung pada berkas fisik. Selain itu, persidangan menjadi lebih efisien karena dokumen seperti jawaban, replik, dan duplik sudah tersedia sejak awal dalam sistem. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala, salah satunya adalah keterlambatan dalam pengunggahan berkas akibat ketidaksiapan dokumen atau kesalahan teknis dalam proses unggah.

2. Efektivitas *E-court* dalam perkara cerai gugat pengadilan agama Balikpapan

Berdasarkan data perkara yang diperoleh dari Pengadilan Agama Balikpapan, diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk melalui sistem *e-Court* pada tahun 2023 sebanyak 86 perkara pemohon, 334 perkara gugatan dari total 420 perkara dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 144 perkara dari total 633 perkara. Jika dihitung secara persentase, tingkat penggunaan *e-Court* pada tahun 2023 sebesar 20,5%**,** sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 22,7%**.** Dengan demikian, dalam dua tahun terakhir, implementasi e-Court di Pengadilan Agama Balikpapan masih berada pada kisaran 20–40%**,** dan belum mencapai setengah dari total perkara yang didaftarkan. Di Pengadilan agama Kota Balikpapan, sistem ini telah dijalankan oleh berbagai elemen internal seperti petugas PTSP, panitera, hakim, dan ketua pengadilan, yang masing-masing memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan layanan elektronik tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten mendorong transformasi digital dalam sistem peradilan melalui integrasi teknologi informasi. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. (Azzahiroh, Zamahsari, and Mahameru 2020)

Peraturan ini menjadi bagian dari visi Mahkamah Agung dalam membangun sistem peradilan modern yang berbasis teknologi dan berorientasi pada transparansi. Implementasi *e-court* merupakan elemen penting dalam transformasi ini, dengan tujuan mengatasi permasalahan klasik yang kerap membebani sistem peradilan, seperti lambannya penyelesaian perkara, terbatasnya akses terhadap informasi, serta tantangan dalam menjaga integritas aparatur peradilan. Regulasi teknis terkait *e-court* telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 hadir sebagai bentuk pengaturan yang lebih komprehensif dan sistematis.(Hasyim 2023) Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sistem *e-Cour*t di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparatur di Pengadilan Agama Balikpapan, di antaranya adalah hakim dan panitera. Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa kemudahan akses melalui sistem *e-court* dapat memicu peningkatan angka cerai gugat, hakim menegaskan bahwa *e-court* justru menjadi sarana yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu, bukan penyebab, yang mendukung pihak-pihak yang memang telah mengalami permasalahan serius

dalam rumah tangganya untuk menempuh jalur hukum secara lebih praktis dan efisien.Berdasarkan keterangan dari salah satu hakim, beliau menyatakan:

"Efektivitas penerapan perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini sangat membantu dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sistem ini mempercepat proses persidangan serta mempermudah akses layanan hukum, khususnya bagi para pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan."

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa *e-Court* merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Meski tujuannya tetap sama, yaitu mewujudkan peradilan yang efisien, sistem yang baru ini dinilai jauh lebih praktis dan mudah diakses. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran perkara hingga proses *e-Litigasi*, kini dapat dilakukan secara daring. Ini menjadi solusi yang sangat berguna bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak. Jika sebelumnya *E-Court* hanya dapat digunakan oleh advokat atau pengguna terdaftar, kini masyarakat umum juga dapat mengaksesnya secara mandiri. Penulis semula beranggapan bahwa kemudahan yang disediakan oleh sistem *e-Court* dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya ditandai dengan peningkatan jumlah perkara cerai gugat.

Akses yang lebih mudah terhadap proses hukum secara daring dinilai dapat mendorong pasangan untuk lebih cepat mengambil keputusan bercerai tanpa melalui proses mediasi atau upaya rekonsiliasi yang memadai. Namun, pandangan tersebut berubah setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Balikpapan. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa sistem *e-Court* bukanlah penyebab utama meningkatnya kasus perceraian. Justru, sistem ini berperan sebagai sarana yang mempermudah masyarakat terutama mereka yang menghadapi konflik rumah tangga serius seperti permasalahan finansial atau perselingkuhan untuk memperoleh akses ke lembaga peradilan. Dari perspektif hakim, *e-Court* memberikan manfaat dalam bentuk efisiensi administratif, mengingat sistem ini mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat jalannya proses persidangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *e-Court* lebih tepat dipandang sebagai perangkat penunjang dalam penyelenggaraan peradilan, bukan sebagai faktor utama yang mendorong meningkatnya angka perceraian." (Hamidi S.H n.d.)

Berdasarkan pernyataan Humaidi, S.H. (2025), dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah menunjukkan komitmen dalam memperluas pemahaman tentang sistem e-Court, tidak hanya terbatas pada kalangan internal seperti advokat dan pegawai pengadilan, tetapi juga menyasar masyarakat umum sebagai pengguna layanan peradilan. Upaya sosialisasi dilakukan melalui

berbagai media, seperti pemasangan pamflet di kantor, unggahan di media sosial resmi pengadilan, serta forum-forum internal seperti rapat koordinasi dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan telah menjalankan perannya dalam mendukung transformasi digital sistem peradilan melalui pendekatan informatif dan edukatif kepada berbagai pihak.

Peneliti juga menanyakan durasi penyelesaian perkara cerai gugat melalui *e-Court*. Hakim menjelaskan bahwa waktu penyelesaian bergantung pada kompleksitas perkara dan sikap para pihak. Untuk perkara sederhana dan para pihak kooperatif, prosesnya dapat selesai dalam waktu sekitar tiga bulan, hakim menyampaikan: Durasi penyelesaian suatu perkara ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara serta sikap kooperatif dari para pihak yang terlibat. Apabila perkara tergolong sederhana dan para pihak menunjukkan kerja sama yang baik, proses penyelesaian biasanya berlangsung sekitar tiga bulan. Sebaliknya, jika terdapat hambatan seperti kesulitan dalam memanggil tergugat atau mediasi yang memakan waktu, maka proses penyelesaian dapat berlangsung lebih lama dari biasanya. Dari penjalesan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Balikpapan masih tergolong rendah. Hanya sekitar 40 persen dari jumlah total pendaftaran perkara yang dilakukan melalui sistem elektronik, sementara mayoritas masyarakat masih lebih memilih metode pendaftaran manual. Rendahnya penggunaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya pemahaman atau ketidak terbiasaan masyarakat dalam mengoperasikan *e-court*. Banyak pengguna merasa lebih nyaman dengan prosedur konvensional yang sudah mereka kenal.

Namun demikian, meskipun jumlah pengguna *e-Court* masih terbatas, mereka yang sudah menggunakannya umumnya tidak menghadapi hambatan yang berarti. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan advokat atau kuasa hukum yang sudah terbiasa dengan proses digital.

Kendala yang biasanya dihadapi adalah keterlambatan dalam pengunggahan dokumen, namun hal ini dapat diminimalkan dengan perencanaan dan manajemen waktu yang lebih baik.

D. Simpulan

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan terbaru PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sistem e-Court telah menjadi bagian integral dari transformasi layanan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Balikpapan merupakan salah satu institusi yang secara konsisten melaksanakan sistem ini, mencakup tahapan-tahapan penting seperti pembuatan akun, pengajuan gugatan secara daring, pemanggilan para pihak secara elektronik, hingga proses e-litigasi dan pembacaan putusan. Komitmen ini mencerminkan upaya serius untuk menerapkan teknologi informasi dalam menunjang transparansi dan efisiensi peradilan. Walaupun secara institusional penerapan e-Court telah dirancang secara sistematis dan sejalan dengan regulasi yang berlaku, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya terkait partisipasi masyarakat umum. Hingga saat ini, sebagian besar pengguna e-Court berasal dari kalangan profesional seperti advokat atau kuasa hukum yang telah terbiasa menggunakan layanan digital. Sebaliknya, masyarakat awam sebagai pencari keadilan masih cenderung menggunakan metode manual akibat keterbatasan literasi teknologi dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur e-Court. Tingkat efektivitas penerapan e-court di Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikatakan cukup efektif, khususnya pada aspek pelaksanaan administratif dan kesiapan aparat peradilan. Sistem telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan telah diterapkan oleh hakim, panitera, dan petugas PTSP tanpa hambatan teknis yang berarti.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan e-Court belum merata ke seluruh segmen masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang terstruktur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti sosialisasi intensif, edukasi berbasis digital, serta pelatihan teknis yang menyasar lapisan masyarakat yang kurang terjangkau teknologi. Fasilitas penunjang seperti komputer publik di pengadilan serta bantuan teknis bagi pengguna baru juga menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan sistem ini. Secara keseluruhan, efektivitas e-court di Pengadilan Agama Balikpapan dapat dinilai cukup baik, terutama dari sisi administrasi dan kesiapan sumber daya manusia internal. Pelaksanaan sistem telah berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti dan telah dioperasikan oleh hakim, panitera, serta petugas PTSP dengan lancar. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih luas dan merata, perlu adanya kerja sama lintas sektor antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem digital yang kuat dan inklusif dalam mendukung penyelenggaraan peradilan elektronik secara berkelanjutan.

Pengadilan Agama Balikpapan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas sistem e-Court, yang memerlukan upaya konkret seperti sosialisasi dan edukasi publik secara rutin agar masyarakat semakin memahami manfaat dan kemudahan layanan ini. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan masyarakat,

khususnya para pencari keadilan, mulai memanfaatkan fitur seperti e-Filing untuk mempercepat proses pendaftaran perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Masyarakat juga diimbau untuk proaktif mencari informasi atau meminta pendampingan jika mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut.

Daftar Rujukan

Ahadi, Lalu M Alwin, and Lalu M Alwin Ahadi. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products." 5(1): 110–27.

Ahmad Asif Sardaril. 2019. "Pengertian Pengadilan." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1(1): 3–5.

Artauly, Angelika et al. 2023. "Keefektifan E-Court Sebagai Sistem Layanan Perkara Perdata Dalam Menciptakan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pn Bogor." Civilia: *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(3): 162–72.

Ayun, Maryam Qurrota, Erfandi Am, and Muktashim Billah. 2025. "Implementasi E-Court Dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Implementation of E-Court in the Case Registration System for Marriage Cases at the Religious Court of Sungguminasa Gowa Regency." : 8083–98.

Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. 2020. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2(2): 58–74.

Elektronik, Sidang. 2021. "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal Electronic Litigation As A Mean Of Effort To Kehadiran Corona Virus Disease (COVID-19) Yang Menyebar Ke Seluruh Dunia Tidak Terkecuali Indonesia Telah Memaksa Pemerintah Untuk ." 4: 31–44.

Hamidi S.H. "Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Balikpapan." *2025*.

Hasyim, Fuad. 2023. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8(2): 255–68.

Hidayati, Nursitta, and F Lubis. 2024. "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B." 4(5): 1877–89.

Humaidi s, h. 2025. *E-Court Perma No 7th 2022*.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2019. "PERMA_01_2019.Pdf." *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*: 18. https://ecourt .mahkamah agung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

Jailani, M Syahran, Prodi Pendidikan, Guru Madrasah, and Fakultas Ilmu. 2020.

"Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." 4(2): 19–23.
Narbuko, Cholid, and AbuAchmadi.2013. MetodologiPenelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar. Bumi Aksara.
Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. 2019. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data."
Pakpahan, Martina et al. 2022. Metodologi Penelitian. Yayasan Kita Menulis. Pebrianto, Roni, Zainal Azwar, and IkhwanIkhwan. 2021. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)."
Pebrianto, Roni, Zainal Azwar, and Ikhwan Ikhwan. 2021. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)."
Persidangan, Efektivitas, M Sanusi Helmi, Amelia Rahmaniah, and Muhammad Noor Ridani. 2024. "Interdisciplinary Explorations in Research Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Court)." 2: 556–65.
Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(1): 124.
Rijaya.2021."TinjauanYuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan DalamRumahTangga(StudiPerkaraNomor:563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)." Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm) (9).
Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. 2021. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4(2): 135.